

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BUMD DKI

Perlu Evaluasi Pengangkatan Direksi

JAKARTA, KOMPAS — Para pemegang saham PT Transportasi Jakarta membatalkan penunjukan Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Senin (27/1/2020). Donny menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai anggota direksi badan usaha milik daerah di DKI Jakarta.

Keputusan ini diambil di luar rapat umum pemegang saham. Adapun 99 persen saham Transjakarta dimiliki Pemerintah Provinsi DKI dan 1 persen milik Jakarta Propertindo.

Penunjukan Donny sebagai Direktur Utama Transjakarta dilakukan pada 23 Januari. Pada Sabtu (25/1), Badan Pembina (BP) BUMD DKI menerima laporan tentang status hukum Donny. Laporan diverifikasi dan terbukti benar. Pembatalan penunjukan Donny merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Faisal Syafrudin dalam keterangan tertulis menjelaskan, walaupun Donny telah mengikuti uji kompetensi dan keahlian serta dinyatakan lolos untuk posisi direksi di BUMD Pemprov DKI, pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan bahwa tidak pernah dihukum (butir 2 surat pernyataan) ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tersebut juga mengangkat Yoga Adiwiranto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Transjakarta.

Ada kesalahan proses

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, kasus ini menunjukkan ada kesalahan dalam proses pengangkatan pejabat BUMD DKI. Kesalahan semacam ini muncul karena ada celah hukum dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

Dalam Pasal 5 poin f disebutkan, salah satu persyaratan calon direksi BUMD adalah calon orang perseorangan di luar pejabat direksi dan karyawan BUMD, yang diusulkan oleh gubernur. Prasetio berpendapat, pengangkatan direksi BUMD tetap harus melalui proses seleksi yang ketat, bukan atas kepentingan pribadi.

Informasi tentang rekam jejak Donny sebagai terpidana kasus penipuan pada 2017 juga diterima Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. Ombudsman berencana melakukan konfirmasi kepada Pemprov DKI. "Ombudsman menilai ada malaadministrasi," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho.

Belum sempat Ombudsman melakukan konfirmasi, pada Senin pagi Pemprov DKI membatalkan penunjukan Donny. "Yang jadi masalah kenapa BP BUMD sampai gagal melakukan penelusuran latar belakang yang bersangkutan. Apalagi di DKI ada TGUPP bidang pemberantasan korupsi. Harusnya gampang untuk DKI menelusuri. Pak Gubernur juga bisa melacak melalui Forkopimda," ujar Teguh. (HLN/BOW)